



DINAS SOSIAL

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2025



**KOTA SURABAYA
TAHUN 2025**



BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang memuat penyesuaian atau perubahan terhadap Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun berjalan, yang disusun sebagai tindak lanjut atas perubahan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dalam tahun yang sama. Perubahan ini mencakup revisi terhadap program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian, lokasi, kelompok sasaran, dan/atau pagu anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan penyusunan Renja perangkat daerah
 - Mengkaji Dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah
 - Menganalisis evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
 - Menginventarisasi permasalahan actual, isu strategis, serta usulan dari masyarakat
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
 - Menyusun rancangan awal renja berdasarkan renstra, pagu indikatif, dan prioritas pembangunan RKPD
 - Memuat arah kebijakan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, target capaian, dan kebutuhan pendanaan
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
 - Melaksanakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah untuk menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dan menampung masukan dari para pemangku kepentingan.
 - Penyelarasan dengan hasil Musrenbang Kecamatan dan usulan masyarakat.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
 - Menyempurnakan Rancangan Awal Renja berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah.
 - Menyesuaikan dengan kebijakan dan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rancangan RKPD.
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah
 - Rancangan Akhir Renja disampaikan kepada Bappeda sebagai bahan penyusunan Rancangan Akhir RKPD.

- Digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) serta KUA-PPAS.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan:

- Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
- Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

1.1 Maksud dan Tujuan

1.1.1 Maksud Penyusunan Rancangan Kerja Perubahan Perangkat Daerah

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Sosial.

1.1.2 Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025 adalah:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka 1 tahun;
2. Menyesuaikan rencana kerja Perangkat Daerah dengan perubahan kebijakan, prioritas, dan kondisi keuangan daerah;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah;
4. Merespons dinamika dan kebutuhan aktual di lapangan, termasuk keadaan darurat, bencana, atau kondisi sosial-ekonomi yang berubah;
5. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan;
6. Mengakomodasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja semester pertama, yang menunjukkan perlunya penyesuaian strategi dan target.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Lembaran negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran negara Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomo 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dari Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Dinas Sosial Daerah provinsi dan Dinas Sosial daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
32. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial;
33. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Rehabilitasi Sosial;
34. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2045;
35. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
36. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
37. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
38. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 03 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
39. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2045;
40. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2025-2045;
41. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 118 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Pondok Sosial Keputih Pada Dinas Sosial Kota Surabaya;
42. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri Pada Dinas Sosial Kota Surabaya;
43. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Griya Wreda Dan Lingkungan Pondok Sosial Kusta Babat Jerawat Pada Dinas Sosial Kota Surabaya;
44. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 117 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin;

45. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pembayaran Listrik kepada Lanjut Usia Tunggal Keluarga Miskin di Kota Surabaya;
46. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kota Surabaya Tahun 2025;
47. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/273/436.1.2/2021 tentang Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Sosial Kota Surabaya;
48. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/134/436.1.2/2025 tentang Perubahan Rencana kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menjelaskan gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025 yang berisi uraian tentang latar belakang penyusunan rencana Kerja Perubahan, landasan hukum yang digunakan, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASIRENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab II memuat kajian evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun 2024, perkiraan capaian renja pada tahun 2024, capaian Renstra Dinas Sosial, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab III Menjelaskan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial. Serta perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Sosial.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan

kegiatan. Misal:

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- Pengentasan kemiskinan,

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan program dan kegiatan yang rumusannya tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan

BAB V

PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Sosial tahun 2025 sebagai penjabaran pelaksanaan renstra Dinas Sosial 2021-2026 periode tahun ke-4 dilaksanakan dalam 5 program dan 8 kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (3 Kegiatan)
2. Program Pemberdayaan Sosial (1 kegiatan)
3. Program Rehabilitasi Sosial (2 kegiatan)
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (1 kegiatan)
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (1 kegiatan)

Pada bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Kajian (review) Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Tingkat Kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan tahun 2025 mencapai 95.92% . Capaian Program tersebut dicapai melalui kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi targetnya ditahun 2025 mencapai 100%, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah realisasi target 100% dan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi targetnya 100%
2. Program Pemberdayaan Sosial dengan 2 indikator, pertama persentase PSKS yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial mencapai 66.48% dan kedua persentase jenis PSKS dan Lembaga Kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial mencapai 54.55%
3. Program Rehabilitasi sosial dengan empat indikator mencapai target realisasi 100%, Capaian program tersebut dicapai melalui kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Kegiatan Rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Indikator persentase MBR yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial Realiasi capaiannya mencapai 98.52%, Capaian Program tersebut dicapai melalui kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Sosial dalam melaksanakan program dan kegiatannya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renstra Dinas Sosial. Dalam penyusunan rancangan awal renja 2026, evaluasi atas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan atas ketercapaian target tetap dibutuhkan sebagai penyempurna kekurangan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun lalu.

Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Surabaya berdasarkan tugas dan fungsinya bisa dilihat dari Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja. Maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berikut Capaian Pelayanan Dinas Sosial Kota Surabaya dalam Tabel. 2.1

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11			13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%
1		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																						
1.06			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial																					
1.06.01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			24,100,497		18,155,767		21,167,206		3,807,772		-		-		-		3,807,772		3,807,772		15,80 %
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan [615]	88 %		94.01 %		88 %		95.92 %		-		-		-		95.92 %		95.92 %		109.00 %	
1.06.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19,227,230				18,012,806		3,380,045		-		-		-		3,380,045		3,380,045		17.58 %
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN [1219]	100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		100 %		100.00 %	
1.06.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN [1497]			19,227,230				18.012.806		3.380.045		-		-		-		3.380.045		3.380.045		17.58 %
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [4940]	45 Orang/bulan		47 Orang/bulan		48 Orang/bulan		44 Orang/bulan		-		-		-		44 Orang/bulan		44 Orang/bulan		97.78 %	
1.06.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah			2,354,427				1,886,980		117,873		-		-		-		117,873		117,873		5.01 %

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)		
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
													K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)							
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11				13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%
						Persentase ketersediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor [735]	100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		100 %		100.00 %		
1.06.01.2.06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [1402]			2,354,427			1.886,980		117,873		-		-		-		117,873		117,873		5,01 %		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [4939]	12 Paket		12 Paket		12 Paket		3 Paket		-		-		-		3 Paket		3 Paket		25,00 %		
1.06.01.2.08					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,518,840			1,267,419		309,854		-		-		-		309,854		309,854		12,30 %		
						Persentase Pelayanan Pelayanan Umum Kantor [730]	100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		100 %		100,00 %		
1.06.01.2.08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [1387]			2,518,840			1,267,419		309,854		-		-		-		309,854		309,854		12,30 %		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [4938]	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan		25,00 %		
1.06.02					Program			8,489,7		5,301,0		6,332,7		1,534,6		-		-		-		1,534,6		1,534,6		18,08	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
												K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11				13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
				Pemberdayaan Sosial			57		61		70		06						06			06			%		
					Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial [900]	88.98 %		87.00 %		87.97 %		66.48 %		-		-		-		66.48 %		66.48 %		74.71 %			
					Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial [901]	100 %		100.00 %		94.12 %		54.55 %		-		-		-		54.55 %		54.55 %		54.55 %			
1.06.02.2.03				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			8,489,757			6,332,770		1,534,606		-		-		-		1,534,606		1,534,606		18.08 %			
					Jumlah jenis PSKS perorangan yang dibina [2058]	7 jenis		6 jenis		6 jenis		3 jenis		-		-		-		3 jenis		3 jenis		42.86 %			
					Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS kelembagaaan [2185]	372 orang		1104 orang		367 orang		313 orang		-		-		-		313 orang		313 orang		84.14 %			
1.06.02.2.03.0001				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial			6,940,781			5.501.695		1.448.781		-		-		-		1.448.781		1.448.781		20,87 %			

Kode	Sasara n	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)				
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)							
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11			13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota [3537]																						
						Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota [4943]		597 Orang		897 Orang		590 Orang		239 Orang		-		-		-		239 Orang		239 Orang			40.03 %	
1.06.02.2.03.0004						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota [1240]			1,548,976			831.076		85.826		-		-		-		85.826		85.826			5,54 %	
						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota [4935]		12 Lembaga		8 Lembaga		8 Lembaga		8 Lembaga		-		-		-		8 Lembaga		8 Lembaga			66.67 %	
1.06.04						Program Rehabilitasi Sosial			80,585,488		35,102,514		40,391,046		6,934,203		-		-		-		6,934,203		6,934,203			8,60 %
						Persentase lansia terlanjar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial		100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %			100.00 %	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
												K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11			13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%
					[1417]																				
					Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial [1418]	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00 %	
					Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial [1419]	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00 %	
					Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial [1420]	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00 %	
1.06.04.2.01				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			59,054,679				29,844,376		4,933,177		-		-		-		4,933,177		4,933,177		8.35 %
					Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar	12 kali		12 kali		12 kali		3 kali		-		-		-		3 kali		3 kali		25,00 %	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9	10		11		12=8+9+10+11				13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%
							bagi Anak [2038]																				
							Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Lanjut Usia [2040]	12 kali		12 kali		12 kali		3 kali		-		-		-		3 kali		3 kali		25,00 %	
							Jumlah kegiatan pelayanan reunifikasi bagi PMKS [1888]	12 kali		12 kali		12 kali		3 kali		-		-		-		3 kali		3 kali		25,00 %	
							Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas [2041]	12 kali		12 kali		12 kali		3 kali		-		-		-		3 kali		3 kali		25,00 %	
1.06.04.2.01.0008						Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar [3669]			5,917,303				6.856,459		1.239,436		-		-		-		1.239,436		1.239,436		20,95 %
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota [5843]	130 Orang		99 Orang		300 Orang		233 Orang		-		-		-		233 Orang		233 Orang		179,23 %	
1.06.04.2.01.0005						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial [1311]			37,558,454				8.386,630		1.022,020		-		-		-		1.022,020		1.022,020		2,72 %

Kode	Sasara n	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11				13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenanga n Kabupaten/ Kota [4937]	215 Orang		224 Orang		230 Orang		243 Orang		-		-		-			243 Orang		243 Orang			113.02 %	
1.06.04.2.01.0012						Pemberian Layanan Rujukan [3670]			1,615,342			746.963		145.941		-		-		-			145.941		145.941			9,03 %	
						Jumlah Orang Mendapatka n Layanan Rujukan Kewenanga n Kabupaten/ Kota [5844]	40 Orang		50 Orang		40 Orang		44 Orang		-		-		-			44 Orang		44 Orang			110.00 %		
1.06.04.2.01.0004						Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga [1225]			476,574			367.320		20.260		-		-		-			20.260		20.260			4,25 %	
						Jumlah Orang yang Mendapatka n Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenanga n Kabupaten/ Kota [4932]	795 Orang		1828 Orang		795 Orang		283 Orang		-		-		-			283 Orang		283 Orang			35.60 %		
1.06.04.2.01.0001						Penyediaan Permakana n [4704]			13,487,005			13.487.005		2.505.521		-		-		-			2.505.521		2.505.521			18,58 %	
						Jumlah Orang yang Mendapatka n Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi	1470 Orang		2329 Orang		1470 Orang		1629 Orang		-		-		-			1629 Orang		1629 Orang			110.82 %		

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)				
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)							
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11				13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%
							Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota [6888]																					
1.06.04.2.02						Rehabilitasi Sosial Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			21,530,809			10,546,670	2,001,026	-	-	-	-		2,001,026			2,001,026			2,001,026			9,29 %
							Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial [2057]	12 kali		12 kali		12 kali	3 kali	-	-	-	-	3 kali		3 kali			25,00 %					
							Jumlah laporan pemberian layanan kedaruratan [1890]	12 laporan		12 laporan		12 laporan	3 laporan	-	-	-	-	3 laporan		3 laporan			25,00 %					
1.06.04.2.02.0007						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial [1230]			17,475,588			6.843.025	1.250.557	-	-	-	-		1.250.557			1.250.557			1.250.557			7,16 %
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota [4933]	1100 Orang		1877 Orang		900 Orang	1112 Orang	-	-	-	-	1112 Orang		1112 Orang			101,09 %					
1.06.04.2.02.0002						Pemberian Layanan Kedaruratan [1239]			4,055,221			3.703.644	750.469	-	-	-	-		750.469			750.469			750.469			18,51 %

Kode	Sasara n	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)				
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)													I		II
								K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11				13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%
							Jumlah Orang yang Mendapatka n Pelayanan Kedaruratan Kewenanga n Kabupaten/ Kota [4934]	4716 Orang		11095 Orang		4716 Orang		1642 Orang	-		-		-			1642 Orang		1642 Orang		34.82 %		
1.06.05						Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial			10,901, 678		33,947, 754		34,824, 477		2,371,6 67	-		-		-			2,371,6 67		2,371,6 67		21,76 %	
						Persentase MBR yang memperole h perlindung an dan jaminan sosial [555]		87 %		98.07 %		87 %		98.52 %	-		-		-			98.52 %		98.52 %		113.24 %		
1.06.05.2.02						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			10,901, 678				34,824, 477		2,371,6 67	-		-		-			2,371,6 67		2,371,6 67		21.76 %	
						Jumlah laporan pemutakhira n dan pengelolaan data PMKS dan MBR [1143]		12 laporan		12 laporan		12 laporan		3 laporan	-		-		-			3 laporan		3 laporan		25.00 %		
						Jumlah laporan koordinasi dan monitoring intervensi sosial [1144]		12 laporan		12 laporan		12 laporan		3 laporan	-		-		-			3 laporan		3 laporan		25.00 %		
1.06.05.2.02. 0004						Fasilitasi Bantuan Pengemban gan Ekonomi Masyarakat [4670]			116,497				3.791.6 23		0	-		-		-			0		0		0,00 %	
						Jumlah Orang Mendapatka n Bantuan		2229 Orang		1071 Orang		2229 Orang		0 Orang	-		-		-			0 Orang		0 Orang		0.00%		

Kode	Sasara n	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11				13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
							Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota [6850]																						
1.06.05.2.02.0003							Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga [1266]		5,865,631			26.291.553		1.433.965		-		-		-		1.433.965			1.433.965			24,45%	
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota [4936]	83899 Keluarga		42407 Keluarga		33723 Keluarga		25414 Keluarga		-		-		-		25414 Keluarga			25414 Keluarga		30,29%		
1.06.05.2.02.0001							Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota [3449]		4,681,621			4.082.445		796.615		-		-		-		796.615			796.615			17,02%	
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata [4942]	534731 Orang		118222 Orang		92892 Orang		69515 Orang		-		-		-		69515 Orang			69515 Orang		13,00%		
1.06.05.2.02.0002							Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota [1189]		237,929			658.855		141.087		-		-		-		141.087			141.087			59,30%	

Kode	Sasara n	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)							
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11				13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota [4931]	264931 Keluarga		42408 Keluarga		33723 Keluarga		25414 Keluarga	-		-		-		25414 Keluarga		25414 Keluarga		9.59%			
1.06.07						Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			1,980,041		2,237,866		1,350,914		268,206	-		-		-		268,206		268,206		13,55 %		
						Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik [1520]		100 %		100.00 %		100 %		100.00 %	-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00 %			
1.06.07.2.01						Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			1,980,041				1,350,914		268,206	-		-		-		268,206		268,206		13.55 %		
						Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan [1876]		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis	-		-		-		3 Jenis		3 Jenis		100.00 %			
1.06.07.2.01.0002						Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota [3441]			1,980,041				1.350.914		268.206	-		-		-		268.206		268.206		13,55 %		
						Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan nya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota [4941]		7 Makam		7 Makam		7 Makam		7 Makam	-		-		-		7 Makam		7 Makam		100.00 %			

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Program dan Kegiatan Dinas Sosial Sebagai Berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

b. Program Pemberdayaan Sosial

4. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

c. Program Rehabilitasi Sosial

5. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan pengemis di Luar Panti Sosial.
6. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

7. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

8. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional

B. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Perumusan kegiatan Dinas Sosial tahun 2025 berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Kota Surabaya dan Visi Misi OPD.
2. Penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah.
3. Prioritas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

C. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Perubahan Renja Dinas Sosial tahun 2025 disusun mengacu kepada Renstra Kota Surabaya Tahun 2025-2029 yang mengacu RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029. Renja Perubahan Dinas Sosial tahun 2025 memuat Rencana Program dan Rencana Kegiatan. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 sebelum perubahan dan sesudah perubahan terdapat pada tabel 3.1 terlampir .

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Sosial
Tahun 2025

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	88 %	21,167,205,506	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	88 %	21,012,387,182	
	1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	18,012,806,399	1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	18,552,084,199	
	1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	18,012,806,399	1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	18,552,084,199	
	1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor	100 %	1,886,979,894	1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor	100 %	972,411,280	
	1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1,886,979,894	1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	972,411,280	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelayanan Pelayanan Umum Kantor	100 %	1,267,419,213	1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelayanan Pelayanan Umum Kantor	100 %	1,487,891,703	
	1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,267,419,213	1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,487,891,703	
2	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	94.12 %	6,332,770,225	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	94.12 %	6,867,297,495	
			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	87.97 %				Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	87.97 %		
	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber		Jumlah jenis PSKS	6 jenis	6,332,770,225	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber		Jumlah jenis PSKS	6 jenis	6,867,297,495	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		perorangan yang dibina			Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		perorangan yang dibina			
			Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS kelembagaan	367 orang				Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS kelembagaan	852 orang		
	1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	590 Orang	5,501,694,537	1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	545 Orang	6,071,260,156	
	1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Lembaga	831,075,688	1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Lembaga	796,037,339	
3	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100 %	40,391,045,686	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100 %	41,017,046,315	
			Persentase lansia terlantar	100 %				Persentase lansia terlantar	100 %		

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial					yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial			
			Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100 %				Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100 %		
			Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100 %				Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100 %		
	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah kegiatan pelayanan reunifikasi bagi PMKS	12 kali	29,844,376,108	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah kegiatan pelayanan reunifikasi bagi PMKS	12 kali	29,766,986,924	
			Jumlah kegiatan rehabilitasi	12 kali				Jumlah kegiatan rehabilitasi	12 kali		

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			sosial dasar bagi Anak					sosial dasar bagi Anak			
			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Lanjut Usia	12 kali				Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Lanjut Usia	12 kali		
			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas	12 kali				Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas	12 kali		
	1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1470 Orang	13,487,004,921	1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	2.346 Orang	13,487,004,921	
	1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	795 Orang	367,319,572	1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	795 Orang	202,060,034	
	1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan	Dinas Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	230 Orang	8,386,630,063	1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan	Dinas Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	230 Orang	8,087,866,122	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			
	1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	6,856,458,727	1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	376 Orang	7,282,546,015	
	1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan	Dinas Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	746,962,825	1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan	Dinas Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	707,509,832	
	1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial	12 kali	10,546,669,578	1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial	12 kali	11,250,059,391	
			Jumlah laporan pemberian layanan kedaruratan	12 laporan				Jumlah laporan pemberian layanan kedaruratan	12 laporan		

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	4716 Orang	3,703,644,466	1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	4716 Orang	4,054,258,696	
	1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Orang	6,843,025,112	1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1700 Orang	7,195,800,695	
4	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87 %	34,824,476,671	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87 %	30,041,635,309	
	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan koordinasi dan monitoring intervensi sosial	12 laporan	34,824,476,671	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan koordinasi dan monitoring intervensi sosial	12 laporan	30,041,635,309	
			Jumlah laporan pmutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR	12 laporan				Jumlah laporan pmutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR	12 laporan		
	1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan	Dinas Sosial	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah	92892 Orang	4,082,444,741	1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan	Dinas Sosial	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah	70.312 Orang	4,813,806,705	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Daerah Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota yang Didata			Daerah Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota yang Didata			
	1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	33723 Keluarga	658,855,486	1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	25.901 Keluarga	668,752,856	
	1.06.05.2.02.0003 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	33723 Keluarga	26,291,553,140	1.06.05.2.02.0003 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25.901 Keluarga	20,767,452,444	
	1.06.05.2.02.0004 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2229 Orang	3,791,623,304	1.06.05.2.02.0004 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	680 Orang	3,791,623,304	
5	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik	100 %	1,350,913,580	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik	100 %	1,367,348,476	
	1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman		Jumlah jenis kegiatan	3 Jenis	1,350,913,580	1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman		Jumlah jenis kegiatan	3 Jenis	1,367,348,476	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		pemeliharaan Taman Makam Pahlawan			Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		pemeliharaan Taman Makam Pahlawan			
	1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Dinas Sosial	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	7 Makam	1,350,913,580	1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Dinas Sosial	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	7 Makam	1,367,348,476	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2025 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial pada tahun 2025 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.

Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2025 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya, 05 Agustus 2025

Kepala Dinas Sosial

Kota Surabaya



MIA SANTI DEWI SH, M.Si

Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 1969012619994032003